

ENERGI GEOTERMAL

Berpotensi Bahaya, Butuh Kedisiplinan

Jakarta, Kompas - Meski didengungkan sebagai sumber energi yang rendah emisi, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP berpotensi menghasilkan zat berbahaya bagi lingkungan. Prinsip kehati-hatian dan kedisiplinan dalam mengoperasikan proyek wajib dilakukan agar tidak terjadi kebocoran sistem pembangkit.

Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi, Pius Ginting, Kamis (4/8) di Jakarta, mengatakan, sistem pemanas geotermal mengandung gas tak terkondensasi seperti hidrogen sulfida (H_2S), karbondioksida (CO_2), metana (CH_4), dan gas lain dalam jumlah kecil.

Salah satu efek H_2S , merusak vegetasi. "Bila kita naik ke gunung api, di sekitar puncak pasti tak ditemui vegetasi sebab kandungan belerang tinggi," kata dia.

Kepala Juru Kampanye Hutan Global Forest Network-Greenpeace Bustar Maitar mengatakan, PLTP relatif tidak membutuhkan lahan luas. Areal hanya diperlukan untuk pengeboran dan sistem pemipaan. "Yang harus diawasi, kebutuhan areal PLTP berapa. Jangan sampai kebutuhan 5 hektar, mintanya 100 hektar. Sebagian besar geotermal ada di kawasan konservasi," katanya.

Menanggapi Menhut Zulkifli Hasan yang menjanjikan investor geotermal hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk mengurus izin beroperasi di kawasan hutan (Kompas, 4/8), Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Suryadarma mengatakan, hal itu perlu ditegaskan dalam aturan main tertulis.

Investor geotermal memerlukan detail persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya, pembukaan hutan lindung untuk pendirian geotermal telah diizinkan, tetapi dalam pelaksanaan berbelit-belit sehingga proses perizinan perlu waktu hingga dua tahun. Investor juga harus mengantongi rekomendasi bupati/gubernur. Hal ini, kata dia, tak jelas sehingga investor kurang tertarik.

Bahan bakar nabati

Kelangkaan energi khususnya solar di beberapa daerah di Indonesia menjadikan penggunaan bahan bakar nabati makin berpeluang. Salah satunya, surplus produksi minyak sawit yang diekspor saat ini mencapai sekitar 16 juta ton per tahun semestinya dapat dialihkan untuk mengatasi kelangkaan minyak solar untuk ketahanan energi dalam negeri. "Minyak sawit sudah pernah diuji BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) untuk membangkitkan listrik di beberapa daerah di Sumatera sampai kapasitas 50.000 kilowatt hour, dan terbukti berhasil dengan baik," kata Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material pada BPPT, Unggul Priyanto, Jumat (5/8) di Jakarta.

Saat ini, kata Unggul, rata-rata produksi minyak sawit 21 juta ton per tahun. Kebutuhan akan minyak sawit dalam negeri hanya 4 juta ton-5 juta ton per tahun. Selebihnya untuk ekspor. Untuk generator pembangkit listrik minyak sawit cukup dicampurkan sebesar 50 persen dengan solar.

"Adapun untuk transportasi masih membutuhkan pengolahan menjadi biodiesel," katanya.

(ICH/NAW)